

## **KESADARAN BERDEMOKRASI UMMAT MENINGKAT DAN MEMUDARNYA POLITIK IDENTITAS PADA PEMILU 2024**

**Tumpal Daniel S<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qalam Tangerang, Indonesia;  
tumpaldaniels@gmail.com

---

Submit : 23/05/2024 | Review : 25/05/2024 s.d 01/06/2024 | Publish : 09/06/2024

---

### **Abstract**

Kesadaran Berdemokrasi Ummat Meningkat dan Memudarnya Politik Identitas di Pemilu 2024. Penggunaan isu politik identitas dalam kontestasi elektoral di Indonesia sudah sering terjadi dan menjadi momok pada tingkat pemilu lokal dan nasional. Pemilu 2024 awalnya dikhawatirkan menjadi etalasi politik identitas berulang, tapi hal tersebut tidak terjadi. Kondisi ini menunjukkan proses berdemokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Variabel apa sehingga politik identitas tidak muncul ke permukaan. Pertanyaan ini yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Ternyata, antisipasi munculnya politik identitas oleh pemangku kepentingan dan kesadaran berdemokrasi di kalangan ummat telah terjadi peningkatan kualitas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif bahwa memudarnya politik identitas pada Pemilu 2024 menjadi harapan baru demokrasi di Indonesia semakin berada.

**Keywords** : Pemilu 2024, Politik Identitas, Ummat

### **Pendahuluan**

Pemilu tahun 2024 sudah berakhir dan menghasilkan para pemenangnya. Sejak KPU mengeluarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, KPU menetapkan bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 secara serentak (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, 2022). Pemilihan Umum 2024 akan menjadi penentu nasib bangsa

kedepan. Pertama, pemilu ini akan menentukan apakah Indonesia akan lebih kuat, bersatu dan maju. Kedua, akan menentukan juga apakah demokrasi Indonesia lebih dewasa dan berkembang. Atau sebaliknya, mengingat Pemilu 2019 masih meninggalkan luka yang mendalam. Polarisasi dan konflik sosial belum sembuh betul, ancaman keterbelahan di antara anak bangsa masih menjadi ingatan kolektif dan dapat meledak kapan saja terlebih dalam situasi pemilu berlangsung *head to head* dan muncul populisme menggunakan isu-isu politik identitas yang sengaja dirawat oleh yang berkepentingan untuk tujuan elektoral semata (Tumpal Daniel S, 2023).

Pasca Reformasi dinamika politik identitas jauh lebih beragam. Menyoroti kebangkitan politik identitas dalam proses demokratisasi pasca orde baru. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan media sosial telah mempercepat penyebaran dan pengaruh untuk berekspresi. Populisne berbasis etnis dan agama setidaknya terbaca dari hasil penelitian Wingarta yang mengeksplorasi pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia, yang dapat dijadikan acuan dalam menganalisis tentang politik identitas. Politik identitas pasca-reformasi telah menjadi lebih menonjol, khususnya dalam konteks pemilihan umum, di mana identitas etnis dan agama sering kali dijadikan alat untuk menggalang dukungan politik (Wingarta et al., 2022).

Kemunculan media sosial dan platform digital juga turut memengaruhi perkembangan politik identitas di era pasca-reformasi. Media sosial menjadi alat yang efektif untuk mobilisasi dan penyebaran semangat populisme dan narasi identitas, yang tidak jarang memperkuat polarisasi dan meruncingkan keadaan. Hal ini terasa signifikan di kota-kota besar di mana akses ke teknologi informasi relatif lebih tinggi (Permatasari, 2021).

## Metode Penelitian

Jurnal yang menjadi pembanding penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Perdana dengan judul ‘Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang (Perdana, 2023). Disimpulkan politik identitas seringkali disalahpahami sebagai bagian dari politik praktis atau bahkan merupakan politik kebangsaan. Memang, kesamaan identitas menjadi pemersatu bagi anggota suatu kelompok (*in group unity*). Namun, dalam konteks kebangsaan Indonesia yang majemuk, menonjolkan identitas kelompok secara berlebihan justru dapat menjadi potensi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa (*nation unity*). Disinilah pembeda antara politik identitas dengan politik kebangsaan, sebab yang satu ingin meraih tujuan eksklusif kelompoknya sendiri, sedangkan yang lain bertujuan untuk meraih tujuan inklusif bagi kehidupan bersama.

Kedua, Kholilurrohman dalam artikel berjudul “Praktik Politik Identitas Menuju Pemilu 2024 dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi”, mengatakan bahwa Politik identitas adalah strategi politik yang menggunakan identitas sosial seperti suku, agama, atau gender untuk memperoleh dukungan elektoral (Kholilurohman, 2024). Artikel ini menjelaskan bagaimana praktik politik identitas memengaruhi pemilih. Pemilihan umum 2024 di Indonesia menjadi penting karena praktik politik identitas dapat memengaruhi hasilnya. Partai politik menggunakan identitas etnis atau agama untuk memperoleh dukungan dari kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan isu-isu penting seperti kebijakan publik atau kinerja pemerintah. Praktik politik identitas berdampak pada demokrasi. Fokus pada identitas dapat mengancam kesatuan sosial dan kohesi nasional. Selain itu, praktik politik identitas sering memicu polarisasi dan konflik antar kelompok.

Penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesadaran ummat dalam berdemokrasi di tengah potensi politik identitas yang masih terasa. Peneliti menggunakan metode yang dinilai tepat yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007).

## Politik Identitas

Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah penandaan aktivitas politis (Heyes, 2007). Dalam pengertian yang lebih luas politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Jika dicermati politik identitas sebenarnya merupakan nama lain dari biopolitik yang berbicara tentang satu kelompok yang diidentikkan oleh karakteristik biologis atau tujuan-tujuan biologisnya dari suatu titik pandang. Sebagai contoh adalah politik ras dan politik gender.

Menurut Agnes Heller politik identitas adalah gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai satu kategori politik (Rahman, 2020). Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular, dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik dan agama. Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama. Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing (Abdillah, 2002).

Jadi secara umum politik identitas dari berbagai hasil penelitian menunjukkan, ada dua faktor yang membuat etnis dan agama menjadi menarik dan muncul untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik. Pertama, ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Ada semacam keperluan untuk mempertahankan atau membela identitas yang dimiliki suatu kelompok. Kedua, ketika proses politik tersebut berlangsung

secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari.

Pemilihan umum, termasuk pilkada, adalah proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertaruhan (Nasrudin, 2019). Isu politik identitas dalam konteks perhelatan elektoral di Indonesia mengalami peningkatan yang tajam mulai pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Fenomena ini diawali dengan blunder yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok ketika menyinggung Al Qur'an Surat Almaida ayat 51, yang memicu reaksi ummat Islam, khususnya di Jakarta ,tempo.co. Reaksi ini diikuti kemudian oleh demonstrasi besar 411 (4 November 2016) di depan istana yang diikuti sekitar 200 ribu orang. Demonstrasi lebih besar digelar pada 2 Desember 2016 atau Aksi 212 dengan tuntutan Ahok mundur dari jabatan gubernur setelah dijadikan tersangka pada kasus penodaan agama. Peningkatan penggunaan politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 terlihat jelas melalui pertengkaran antara massa pendukung Anies dan Ahok di berbagai platform media sosial dan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Contoh yang mencolok adalah beredarnya spanduk dengan narasi "larangan menyolatkan jenazah para pendukung Ahok" (Muhibid, 2024). Fenomena politik identitas ini tidak hanya menjadi perhatian selama Pilkada DKI Jakarta 2017 tetapi juga berlanjut pada Pemilu 2019. Aspek identitas primordial, terutama agama dan etnisitas, menjadi titik tekan utama dalam elektoral tersebut.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, politik identitas tampak mengemuka melalui berbagai bentuk ekspresi dan artikulasi. Semua bentuk ini dapat dilacak kembali pada identitas pembeda dua aspek primordial, yaitu agama dan etnis, yang melekat pada figur calon gubernur, khususnya Basuki Cahaya Purnama (Ahok, yang beragama Kristen dan beretnik Tionghoa) dan Anies Rasyid Baswedan (yang beragama Islam dan beretnik Arab).

Kedua calon ini mewakili dua kutub identitas yang tidak hanya berbeda, tetapi juga berhadapan dalam situasi kontestatif.

Dalam situasi kontestatif tersebut, kubu Anies "diuntungkan" dengan munculnya kasus penistaan agama oleh Ahok, yang awalnya mungkin tidak disengaja untuk menostakan agama Islam namun berkembang menjadi kasus penodaan agama dan memicu aksi besar dari kelompok ummat Islam, yaitu entitas 212 yang didukung oleh Ijtima Ulama. Aksi massa ini menuntut Ahok dipidana berdasarkan kasus surat Al Maidah 51 yang diikuti oleh jutaan ummat Islam di Monas Jakarta. Kubu Anies mengkapitalisasi kasus ini untuk mobilisasi pemilih dan akhirnya berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Fenomena politik identitas yang menyulut kontroversi ini kembali terulang dan membesar selama dan sesudah Pemilu 2019 (Lestari, 2019).

Pada Pemilu 2019 pasangan capres Jokowi-Ma'ruf, terutama Joko Widodo sebagai capres mendapat stigmatisasi melalui berbagai label identitas yang terus dikapitalisasi bahkan setelah Pemilu 2019 berakhir. Jokowi dituduh sebagai keturunan PKI, antek asing, anti-Islam, *phobia* terhadap Islam, penghayat aliran kepercayaan, pendukung dan pelindung LGBT, dan sebagainya.

Sementara itu, kubu Prabowo-Sandiaga juga disematkan dengan berbagai tuduhan stigmatisasi seperti ultranasionalis, Prabowo natalan, pendukung Islam radikal dan khilafah, dan sebagainya. Semua isu yang dilekatkan kepada kedua kubu atau pendukungnya merupakan isu-isu untuk kepentingan elektoral. Melalui isu-isu tersebut, keduanya saling serang untuk meraih simpati publik dan pemilih, meskipun keduanya menolak tuduhan telah memanfaatkan dan mengkapitalisasi isu-isu identitas untuk kepentingan pemenangan pilpres tersebut.

Kubu Jokowi-Ma'ruf menuduh kubu Prabowo-Sandiaga menggunakan propaganda model Rusia dengan strategi "*firehose of falsehood*," yaitu menyebarkan kebohongan secara masif dalam kampanye secara berulang-ulang lewat media untuk memengaruhi pemilih. Serta

memakai strategi "*politic of fear*" (politik ketakutan) dalam kampanye. Sebaliknya, kubu Prabowo-Sandiaga menuduh kubu Jokowi-Ma'ruf melakukan strategi "*playing victim*" terkait isu identitas dan kemudian mempraktikkan politik identitas dengan memilih seorang kyai sebagai calon wakil presiden. Kubu Prabowo-Sandiaga juga menuduh kubu Jokowi-Ma'ruf menyebarkan tuduhan *hoax* untuk mengaburkan fakta-fakta terkait kegagalan pemerintahan Jokowi sebelumnya dan melemahkan data serta argumen yang dikemukakan tim Prabowo-Sandiaga. Dampak saling serang dengan cara mengkapitalisasi isu-isu identitas sebagai faktor non-elektoral untuk meraih simpati dan memenangi kontestasi melahirkan kegaduhan dan pertengkarannya dalam masyarakat, baik di dunia digital maupun di kehidupan nyata sehari-hari (Tumpal Daniel S, 2023).

Situasi ini menyebabkan banyak kasus pertengkarannya antara keluarga atau tetangga yang memiliki dukungan dan pilihan politik yang berbeda. Tebaran isu-isu identitas yang dikapitalisasi dan memengaruhi persepsi serta perilaku pemilih dari kedua kubu ini akhirnya membawa masyarakat Indonesia ke dalam situasi keterbelahan sosial-politik yang merata di berbagai daerah.

Bagaimana dalam menghadapi Pemilu 2024. Masihkah isu politik identitas kembali mendominasi panggung politik, sebagaimana telah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Tentunya hal tersebut menjadi kekhawatiran di tengah masyarakat yang menganggap politik identitas merupakan salah satu penyebab hilangnya toleransi antar sesama. Hal tersebut diperkuat dari temuan data Kompas, bahwa ada kekhawatiran akan hilangnya rasa toleransi di Pemilu 2024. Temuannya adalah, muncul sikap khawatir sebesar 53,5%, sikap sangat khawatir 16,4%, sikap sangat tidak khawatir 3,2%, serta sikap tidak tahu 2,6% (Widi, 2022).

Survei yang sama dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Agustus 2022 menunjukkan bahwa 57,1% responden percaya bahwa politik identitas akan menjadi faktor penting dalam Pemilu 2024. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 71,3% responden khawatir

bahwa politik identitas akan memecah belah masyarakat Indonesia. Kekhawatiran masyarakat terkait isu politik identitas semakin diperkuat dengan fenomena pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kedua pasangan ini memiliki basis pendukung yang berbeda, baik dari segi ideologi, program, maupun identitas. Anies-Amin cenderung mengusung politik identitas yang berbasis agama, yaitu Islam dan menggunakan diki 'Amin', sedangkan Ganjar kedapatan membuat iklan layanan masyarakat dengan cara berwudhu pada waktu azan maghrib (Tumpal Daniel S, 2023).

### **Antisipasi Polarisasi**

Menurut Widya Wati konflik SARA akan terjadi jika politik identitas terjadi secara berlebihan, sehingga memiliki implikasi pada kualitas demokrasi Indonesia, utamanya pelaksanaan pemilu (Wati, 2021). Pertarungan politik, entah itu pemilu ataupun pilkada, jika bernuansa politik identitas juga akan mengarah pada populisme dengan sentimen agama. Konfrontasi antara dua kekuatan ekstrem politik identitas seolah meniadakan ruang moderasi dan jalan tengah yang mengedepankan rasionalitas dan kematangan berpikir. Memilih salah satu pihak adalah kewajiban dan bersikap seolah pihak yang satunya pasti salah. Kondisi demikian tidak memberikan sisa bagi ruang dialog dalam ranah dinamika demokrasi, malah yang ada adalah saling benci, saling curiga, dan munculnya ketegangan di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Mentari, "Politik identitas di Indonesia sering menggunakan simbol dan diki yang bersifat eksklusif dan provokatif (Mentari & Alunaza, 2022). Hal ini dapat menimbulkan polarisasi dan konflik di masyarakat. Kasus yang berhubungan dengan politik identitas di Indonesia umumnya berhubungan dengan agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang di wakili oleh para elit politik dengan artikulasi masing-masing. Tentu sangat berbeda pemahaman sejarah nasionalisme di Indonesia yang dulu

adalah sebuah ideologi perlawanan terhadap kolonialisme. Itu makanya apabila diteliti lebih lanjut dari sejarah Indonesia, politik identitas yang ada di negeri ini pada umumnya berhubungan dengan isu-isu agama, etnis, dan politik (Wati, 2021). Situasi dan keadaan keterserakan identitas dan politik perbedaan tumbuh sangat subur dalam negara atau masyarakat yang multikultural dan multiethnis.

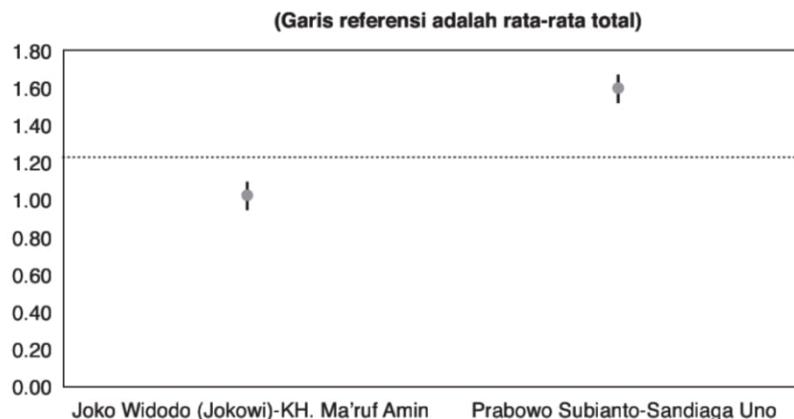
Salah satu kondisi menguatnya kembali penggunaan isu-isu politik identitas pada Pemilu 2024 bilamana terjadi pilpres berlangsung dua putaran. Hal ini berangkat dari pengalaman pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017 antara Anies Baswedan-Sandiaga Uno vs Basuki Cahaya Purnama-Jarot Saeful Hidayat. Kemudian Pemilu 2019 khususnya dalam pilpres, saat berhadapan Jokowi-Maruf Amin vs Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tanpa adanya pasangan lain. Oleh karenanya urgensi pilpres berlangsung satu putaran bukan saja menjadi agenda dari setiap paslon capres-cawapres di 2024 yaitu untuk pasangan 01 Aneis Rasyid Baswedan-Iskandar Muhaemin; Pasangan 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tetapi menjadi agenda seluruh komponen bangsa agar tidak berulang polarisasi ekstrem dengan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilpres semata.

### **Populisme Islam**

Burhanuddin Muhtadi peneliti senior pada Indikator Politik Indonesia menyatakan, kita menyaksikan tren menguatnya sentimen populisme global yang berlandaskan sentimen keagamaan, seperti kasus populisme Hindu di India dan populisme Islam di Turki dan Indonesia. Aktor populis, termasuk aktor yang menyebarkan populisme Islam, umumnya memisahkan masyarakat ke dalam dua kelompok yang antagonistik dan homogen, rakyat yang suci versus elite yang korup. Memang benar bahwa beberapa ideologi yang lain juga mendasarkan pada pertentangan antara

rakyat dan elite. Namun, perbedaannya jika dalam sosialisme pertentangan tersebut didasarkan konsep kelas sosial, dalam ideologi populisme pertentangan terhadap kelompok elite selalu dibalut dengan retorika moralitas. ‘rakyat biasa’ dianggap lebih bermoral karena mewakili kehendak umum, sedangkan elite dianggap sebagai kelompok tidak bermoral. Narasi aktor dan kelompok populis Islam di Indonesia mengadopsi strategi serupa yang dilakukan aktor populis agama di negara lain (Herianto & Wijanarko, 2022).

Populisme Islam di Indonesia Dalam survei nasional Indikator Politik Indonesia pada Februari 2020, kami memakai kerangka teoretis Marcus Mietzner, untuk mengukur tingkat sentimen populisme Islam dengan menanyakan tingkat persetujuan responden terhadap tiga pernyataan berikut dalam skala Likert.Pertama, ummat Islam di Indonesia harus mendapat perlakuan istimewa jika dibandingkan dengan kelompok agama lain. Kedua, orang Tionghoa di Indonesia seharusnya memiliki hak lebih sedikit ketimbang ummat muslim. Ketiga, Indonesia harus diatur sesuai dengan hukum syariat Islam (Muhtadi, 2021).



**Figure 1.** Populisme Islam berdasarkan Pilihan Presiden di 2019

Berdasarkan data survei ini dari beberapa lembaga survei yang kredibel, termasuk survei Indikator Politik Indonesia pada November 2021, ada indikasi kuat di Pemilu 2024, bahwa dukungan terhadap Prabowo menurun secara signifikan. Itu karena pemilih populis mulai bermigrasi dan

mengalihkan dukungannya ke mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Islam populis, seperti mendapat idola baru pada diri Anies setelah Prabowo bersedia menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Jokowi jilid kedua.

Perlu juga dikaji apakah pada Pemilu 2024, Islam populis masih sesolid seperti pada Pemilu 2019. Hal itu penting dilihat karena sejak pemenjaraan Rizieq Shihab dan tokoh-tokoh populisme Islam yang lain. Kita tahu Pemerintahan Jokowi memakai pendekatan represif terhadap kelompok-kelompok populisme Islam. Termasuk dengan pembubaran FPI (Front Pembela Islam) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang selama ini menjadi motor utama penggerak sentimen populisme Islam. Perdebatan yang muncul saat ini ialah apakah ‘hilangnya’ aktor populis karismatik untuk memobilisasi ummat akan melemahkan sentimen populisme Islam di kalangan pemilih muslim.

Atau, apakah hal tersebut justru akan melanggengkan grievances dan narasi marginalisasi, yang beredar di alam bawah sadar kelompok ummat Indonesia, yang siap diaktifkan, dan dimanfaatkan kandidat populis Islam berikutnya, yang memasuki gelanggang elektoral. Jika aktivis Islam populis berhasil membingkai kejadian-kejadian terakhir sebagai bentuk penindasan politik, alih-alih sentimen populisme Islam akan meredup, yang terjadi justru rekonsolidasi gerakan yang punya efek elektoral yang signifikan pada 2024. Publik pun akan kembali menyaksikan kompetisi panjang yang melelahkan dan membela (Muhtadi, 2021).

## **Kesadaran Demokrasi Ummat**

Pengertian dan penggolongan demokrasi dalam pelbagai referensi sangat beragam dan berkembang secara dinamis. Misalnya terdapat penggolongan demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Ada juga varian demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, atau sepuluh penggolongan demokrasi yang

dikemukakan oleh David Held. Begitu pula dalam sejarah, dapat dilihat dari tradisi di Yunani, atau contoh sejarah Islam mulai al-Khulafa' al Râsyidîn sampai dinasti Ottoman. Pada saat berdiri negara Indonesia, para founding fathers menghendaki demokrasi yang berbeda dengan paham liberal di antara pelbagai ragam demokrasi tersebut (Latif, 2011).

Paham liberal, yang diusung melalui revolusi Perancis, dipandang hanya membawa masyarakat Perancis pada demokrasi politik an sich. Pada level tertentu demokrasi seperti itu, hanya menguntungkan kalangan borjuis dan memarjinalkan rakyat jelata (Latif, 2011). Oleh karena itu, dipilih konsep demokrasi permusyawaratan. Demokrasi tersebut diekspresikan ke dalam dasar negara sila keempat, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” (Junaenah, 2016).

Syafi'i Maarif menjelaskan, “Islam berpihak sepenuhnya kepada sistem demokrasi, sekalipun dalam menghadapi isu-isu penting tertentu harus berbeda dengan sistem demokrasi yang berkembang di negara-negara non-Muslim”. Kata syurâ itu sendiri diurai dalam Tafsir Al-Misbah terambil dari kata *syawr*. Kata itu bermakna “mengambil dan mengeluarkan pendapat dengan pendapat lain”. Kata ini diambil dari kalimat *syirtu al-'asal* yang bermakna, “saya mengeluarkan madu (dari wadahnya)”. Hal ini mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu, dan bermusyawarah adalah upaya meraih madu itu di mana pun dia ditemukan atau, dengan kata lain, pendapat siapa pun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya. Madu dihasilkan oleh lebah, maka orang yang bermusyawarah bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, mengagumkan dalam bekerja sama, dan makan sari kembang. Ia hinggap di mana pun tidak pernah merusak, tidak mengganggu kecuali diganggu, sengatannya pun menjadi obat. Itulah deskripsi secara ekplisit tentang permusyawaratan oleh Quraish Shihab (Junaenah, 2016).

Karakter orang yang bermusyawarah oleh Atip Latifulhayat diibaratkan “kualifikasi lebah” (Latipulhayat, 2014). Oleh karena itu, tidak semua orang dapat bermusyawarah. Makna bermusyawarah diilustrasikan sebagai proses menghasilkan madu. Madu merupakan kreasi yang baik, bermanfaat untuk menjadi solusi bagi penyakit, dan sumber kesehatan dan kekuatan. Begitu pula musyawarah, digambarkan sebagai proses mengumpulkan pendapat dan pandangan-pandangan terbaik untuk menghasilkan yang terbaik untuk kebaikan masyarakat. Berkaitan hal itu, Quraish Shihab merujuk surah Âli-'Imrân, 3: 159 ;

“disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakalah kepada-Nya”.

Contoh praktik bermusyawarah yang cukup terkenal adalah cerita yang menjadi latar Surah Âli 'Imrân ayat 159. Pada masa Islam permulaan, Nabi Muhammad Saw. selalu bermusyawarah dengan sahabatnya tentang negara, politik, peperangan, dan hubungan internasional. Misalnya, ketika umat Islam harus berperang menghadapi musuh, nabi menyarankan agar bertahan di dalam kota (Madinah) saja. Namun, para sahabat mengusulkan agar menyambut dan memerangi musuh. Nabi mendengarkan pendapat terbesar yang muncul dalam musyawarah. Akhirnya, diputuskan untuk menyambut musuh di luar kota.

Hasilnya mengecewakan, ummat Islam mengalami kerugian besar. Beberapa hari kemudian Allah memperingatkan Rasul-Nya dengan ayat, “Maka maafkanlah mereka dan mohonlah bagi mereka dalam (segala) urusan”. Al-Buraey mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut untuk tidak berputus asa dalam bermusyawarah, sekaligus meneguhkan bahwa musyawarah merupakan kewajiban bukan sekadar pandangan. Quraish Shihab menafsirkan bahwa kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah

tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama (Shihab, 2022).

Mengingat corak sosiologis masyarakat kita yang masih kental diwarnai paternalistik, dalam implementasinya perilaku santun, toleran, jujur, dan berkeadaban para elit dan tokoh politik akan dapat dilihat dari terbangunnya komunitas politik sebagai *followership*. *Followership* disini dijelaskannya sebagai gambaran karakter yang mempunyai kesediaan untuk bekerjasama, kemampuan untuk mengendalikan egonya, serta *political efficacy* dengan corak komunitas politik yang aktif, partisipatif, kritis, terbuka, toleran dan tetap patuh pada aturan main. Tanpa *followership*, suasana bebas dalam demokrasi cuma sekedar jadi ajang bebas saling menjatuhkan dan bebas saling menjegal. Kebebasan dalam demokrasi lalu diartikan sebagai bebas untuk terus-menerus berebut kursi kekuasaan (Amir et al., 2022).

Konsep Negara Demokrasi mengatakan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana semua warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

## Pemilu 2024 Berlangsung Damai

Pesta demokrasi telah mencapai puncaknya pada 14 Februari 2024, saat rakyat Indonesia berbondong-bondong mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat total 204,8 juta pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, baik di dalam maupun luar negeri. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penyelenggara pemilu terbesar di dunia, dengan cakupan 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 128 negara perwakilan, [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com). Secara umum seluruh rangkaian Pemilu 2024 berlangsung aman, lancar dan kondusif. Bahkan setelah sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil hitung cepatnya (*quick count*) dan KPU mengesahkan perolehan suara sah hasil Pemilu 2024, masyarakat tetap tenang menerima hasil rekapitulasi tersebut.

Di tengah kekhawatiran akan potensi polarisasi di masyarakat akibat pemilu yang diwarnai dengan isu-isu politik identitas, bahkan berlangsung baik, damai dan rukun. Diakui oleh komponen bangsa sebagai satu capaian dalam kemajuan berdemokrasi.

“Suasana kondusif tersebut sedikit banyak jadi bukti Indonesia mampu menjaga muruahnya sebagai negara demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari peran sejumlah tokoh yang tak henti menyampaikan pesannya agar persatuan dan kesatuan bangsa menjadi harga mati yang harus dijaga rakyat di tengah politik. Salah satunya adalah Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi, yang mengimbau masyarakat untuk tetap sabar menanti hasil real count dari KPU dengan menjaga kondusivitas. Menurutnya, hasil hitung cepat Pemilu 2024 yang dilakukan lembaga-lembaga survei terakreditasi adalah salah satu bagian dari demokrasi, namun hasil akhir tetap ada di tangan KPU. "Suasana kondusif Indonesia saat ini harus tetap dijaga. Semua pihak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kalah tetap jaga persatuan, kedamaian, kerukunan. Yang menang jangan euforia berlebihan. Mari tetap saling menghargai," ujarnya Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui rilis tertulis mengimbau semua pihak mengedepankan tenggang rasa usai Pemilu 2024. Kepada pasangan Capres dan Cawapres yang nantinya terpilih secara resmi beserta para pendukungnya diminta tidak jemawa dan euforia yang

berlebihan. Sementara yang belum terpilih untuk berjiwa besar dan legawa menerima hasil resmi yang akan diumumkan oleh KPU. Begitu pula Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi), yang juga tak henti meminta semua pihak tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ketua Umum Permabudhi, Philip K. Wijaya, menegaskan bahwa setelah proses Pemilu 2024 selesai, semua pihak harus kembali bersatu dan bergotong royong membangun negeri tercinta Indonesia. Sementara Parisada Hindu Dharma Indonesia (PDHI) dan sembilan organisasi keagamaan Hindu melalui rilis tertulis ikut memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia atas terlaksananya pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang berjalan dengan lancar dan sukses. Organisasi ini pun mengimbau agar semua pihak, tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan" (Indonesia, 2024).

Apresiasi dari dunia internasional juga diberikan untuk Indonesia yang mampu menyelenggarakan pemilu dengan pemilih dan cakupan wilayah yang sangat luas. Keberhasilan Indonesia menggelar dan menjaga Pemilu 2024 tetap berada dalam koridor demokrasi turut disuarakan para delegasi parlemen negara sahabat yang menghadiri program pemantauan Pemilu atau Election Visit Program (EVP) di Bali beberapa waktu lalu. Salah satu observer, perwakilan dari Northern Illinois University (NIU) Amerika Serikat, Eric Jones, bahkan meyakini Indonesia bisa menjadi contoh negara demokrasi bagi dunia. "Kami telah belajar, kami mendapatkan pelatihan yang bagus di sini tentang Pemilu. Dan menyaksikannya Pemilu yang benar-benar terjadi sungguh mengasyikkan. Saya menaruh harapan besar pada demokrasi Indonesia dan Pemilunya. Indonesia patut bangga dengan tradisi demokrasinya yang kuat," katanya. Senada dengan Eric, delegasi Parlemen Tanzania, Elibarki Immanuel Kingu, turut mengucapkan selamat kepada Indonesia yang dinilainya sudah sukses menyelenggarakan salah satu pemilu terbesar di dunia. "Selamat kepada Indonesia karena telah menyelenggarakan pemilu yang kredibel, transparan, demokratis, dan damai. Selamat Indonesia. Kami punya pelajaran yang bisa diambil dari kalian" (Indonesia, 2024).

Tahapan Pemilu 2024 sudah berakhir, pemenang sudah didapat. Tinggal lagi menunggu pelaksanaan pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD periode 2024-2029 dan yang terakhir pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

## Kesimpulan

Secara umum kesadaran ummat dalam berdemokrasi cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih pada Pemilu 2024. Partisipasi pemilih untuk pemilu legislatif sebesar 81,42% dari 151.796.632 pemilih dan pilpres sebanyak 81,78% dari 164.227.475 pemilih. Untuk pilpres lebih tinggi dari pada Pemilu 2019 yaitu sebesar 81,97% dari 139.091.260 pemilih. Penggunaan isu pelabelan idiom-idiom agama kepada kandidat pada pileg dan pilpres dengan rasa kebencian jauh berkurang dari Pilkada Jakarta 2017 dan Pemilu 2019.

Harapan Pemilu 2024 khususnya pilpres berlangsung satu putaran untuk mencegah politik identitas juga terwujud. Penyelenggara dan peserta pemilu serta pemerintah dan masyarakat, sepertinya sudah mendeteksi segala kemungkinan dari arah dan dinamika populisme Islam dan potensi penggunaan isu-isu politik identitas bila berlangsung pilpres dua putaran harus diantisipasi dan diawasi secara seksama agar eskalasi polarisasi masyarakat terkendali. Agama tidak dijadikan lagi sebagai satu isu yang penting dalam menentukan pemilihan, bahkan bergeser preferensi pemilih kepada program, artikulasi dalam menyampaikan program, gimik kandidat dan entertainment kampanye yang panjang. *Pertama*, Peran pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran ummat terhadap pembangunan demokrasi perlu terus ditingkatkan. *Kedua*, Antisipasi dan pencegahan penggunaan atribut populisme agama dan isu politik identitas di ruang publik perlu diarahkan kepada persoalan kebutuhan ummat yang lebih substansial seperti di bidang pendidikan, kesejahteraan dan pemberdayaan generasi muda untuk masa depan. *Ketiga*, Selalu

mewaspadai potensi polarisasi pada setiap penyelenggaraan pilkada dan pemilu.

## Referensi

- Abdillah, U. (2002). *Politik Identitas Etnis. Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Indonesia Tera.
- Amir, A., Iskandar, A. M., Megarezky, U., & Masyarakat, K. (2022). Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Dalam Berdemokrasi. *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI*, 209–216.
- Herianto, H., & Wijanarko, R. (2022). Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1), 53–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.39581>
- Heyes, C. (2007). *Identity Politic*. Stanford Encyclopedia of Philosophy.
- Indonesia, C. (2024). *Pesan Damai Para Tokoh untuk Pemilu 2024, Bersatu Menjaga Demokrasi*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240219141006-190-1064534/pesan-damai-para-tokoh-untuk-pemilu-2024-bersatu-menjaga-demokrasi>
- Junaenah, I. (2016). Kontribusi Tatanan Islam terhadap Demokrasi Permusyawaranan di Indonesia. *Ahkam*, 16(2), 163–170. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4446>
- Kholilurohman. (2024). Praktik Politik Identitas Menuju Pemilu 2024 dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 4(1), 60–80. <https://doi.org/10.21274/legacy.2024.4.1.60-80>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, (2022).
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Latipulhayat, A. (2014). Meluruskan Makna Demokrasi. *PJIH: Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1.a0>
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017 : Dinamika Politik Identitas di Indonesia. *Jupe: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(4), 12–16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jupe.v4i4.677>
- Mentari, & Alunaza, H. (2022). Multikulturalisme dan Politik Identitas di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(1), 163–170. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i1.810>

- Moleong, L. J. (2007). *Meteodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhid, H. K. (2024). Masjid Tolak Salatkan Pemilih Ahok, Begini Reaksi Warga. *Tempo.Co*.
- Muhtadi, B. (2021). *Populisme Islam dan Lintasan Politik Jelang 2024*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/opini/459669/populisme-islam-dan-lintasan-politik-jelang-2024>
- Nasrudin, J. (2019). Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 34–47. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>
- Perdana, A. P. (2023). Dampak Politik Identitas pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbang*, 11(02), 225–238. <https://doi.org/https://doi.org/10.35450/jip.v11i02.400>
- Permatasari, R. M. (2021). Keududukan Agama di Era Globalisasi (Manajemen Keharmonisan Umat: Sebuah Pendekatan Multikultural). *Al-Manaj: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 41–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/almanaj.v1i2.589>
- Rahman, M. T. (2020). *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/47995/1/ISBN-1-Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial-A5.pdf>
- Shihab, M. Q. (2022). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Tumpal Daniel S. (2023). Pilpres 2024: Pupulisme Islam dan Politik Identitas. *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 5(2 SE-Articles), 94–107.
- Wati, W. (2021). Menguatnya Politik Identitas di Indonesia Baik karena Faktor Agama, Sosial, dan Etnis. *JPPKN: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 66–87. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jppkn.v2i2.44627>
- Widi, S. (2022). Litbang Kompas: Sikap Toleransi di Indonesia Masih Terjaga. *Dataindonesia.Id*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/litbang-kompas-sikap-toleransi-di-indonesia-masih-terjaga>
- Wingarta, I., Helmy, B., Hartono, D. W. I., Mertadana, I., & Wicaksono, R. (2022). Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9, 117–124. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.256>